

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KECIL 5 GROSS TONNAGE DI
DESA KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN
INDRAMAYU**

Riyadi Bagus Pratama, Retna Hanani

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

his study analyzed the community empowerment of small-scale fishermen with vessels under 5 GT (Gross Tonnage) in Karangsong Village, Indramayu Regency, identifying program effectiveness and its influencing factors. Utilizing a qualitative-descriptive approach, primary data were gathered through semi structured interviews with 8 key informants and direct observations of fishermen's activities. Secondary data were obtained from official documents, local government archives, and empowerment program reports. This study evaluated the empowerment process based on Edi Suharto's 5P theoretical framework. The results indicated that within the Enabling, Empowering, and Supporting aspects, the government and related institutions had provided access to fishing zone information, literacy training, and infrastructure assistance, although the distribution remained uneven and not fully inclusive across all levels of fishermen. Regarding Protecting, the social security program (BPJS) successfully offered occupational safety reassurance. However, in the Maintaining aspect, sustainable mentoring remained a weakness due to the sporadic nature of the programs. The discussion concluded that while empowerment was driven by high fishermen motivation and rapid technological adaptation, it was concurrently hindered by administrative constraints and a lack of public facility maintenance. Strengthening inter-institutional coordination and ensuring consistent mentoring are required to achieve sustainable independence for small-scale fishermen.

Keywords: *Fishermen Empowerment, Empowerment Factors, Small Fishermen, Empowerment Theory*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat nelayan kecil dibawah 5 GT di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, mengidentifikasi efektivitas program dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara semi terstruktur terhadap 8 informan kunci dan observasi langsung aktivitas nelayan, serta data sekunder dari dokumen resmi, arsip pemerintah daerah, dan laporan program pemberdayaan, penelitian mengevaluasi proses pemberdayaan berdasarkan kerangka teori 5P Edi Suharto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek Enabling, Empowering, dan Supporting, pemerintah dan lembaga terkait telah membuka akses informasi daerah tangkapan, memberikan pelatihan literasi, serta bantuan sarana prasarana, meskipun distribusinya belum sepenuhnya merata dan inklusif bagi seluruh lapisan nelayan. Pada aspek Protecting, program jaminan sosial (BPJS) telah memberikan rasa aman kerja, namun pada aspek Maintaining, pendampingan berkelanjutan masih menjadi titik lemah karena sifat program yang cenderung sporadis. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pemberdayaan didorong oleh motivasi nelayan yang tinggi dan adaptasi teknologi yang cepat, namun dihambat oleh kendala administratif dan kurangnya pemeliharaan fasilitas publik. Diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan konsistensi pendampingan agar kemandirian nelayan kecil dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Nelayan, Faktor-faktor Pemberdayaan, Nelayan Kecil, Teori Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas perairan 3,257 juta km² dan garis pantai sepanjang 108.000 km memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Produksi perikanan tangkap nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 6,77 juta ton pada 2021 menjadi 7,39 juta ton pada 2024 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024).

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)

Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)
Sukabumi	6.820
Cianjur	1.143
Garut	2.020
Tasikmalaya	1.058
Cirebon	39.069
Indramayu	165.737
Subang	23.110
Karawang	9.198
Bekasi	6.298
Pangandaran	1.403
Kota Cirebon	5.698
Jawa Barat	261.554

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat di antara daerah penghasil ikan terbesar, Provinsi Jawa Barat mencatat total produksi perikanan tangkap laut sebesar 261.554 ton pada 2022, dengan Kabupaten Indramayu sebagai kontributor dominan sebesar 165.737 ton atau lebih dari 63% dari

total produksi provinsi, dengan nilai produksi mencapai sekitar Rp3,13 triliun (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024).

Desa Karangsong di Kecamatan Indramayu merupakan salah satu sentra utama aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data Profil Desa Karangsong (2024), sebanyak 1.805 dari total 6.034 jiwa penduduk berprofesi sebagai nelayan, menjadikan nelayan sebagai kelompok mata pencaharian terbesar. Potensi perikanan yang melimpah ini bertolak belakang dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Penelitian Mutiar (2018) menunjukkan bahwa 46,15% nelayan kecil Karangsong berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan paradoks yang umum terjadi pada masyarakat pesisir: kekayaan sumber daya alam yang berlimpah tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkannya.

Ketidakberdayaan nelayan kecil semakin diperlihatkan oleh insiden Oktober 2023, ketika nelayan Karangsong memprotes kebijakan pembelian BBM bersubsidi berbasis aplikasi digital. Peristiwa tersebut mengungkap jurang antara kebijakan yang berorientasi modernisasi dengan kapasitas nelayan yang masih rendah dalam literasi digital, sekaligus

mengindikasikan minimnya program pendampingan sebelum kebijakan diimplementasikan (Republika Online, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan kecil bukan sekadar persoalan distribusi bantuan material, melainkan sebuah proses sistemik yang mencakup peningkatan kapasitas, perlindungan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pemberdayaan nelayan dari berbagai perspektif. Suryani et al. (2021) meneliti pemberdayaan partisipatif pada kelompok usaha bersama nelayan tangkap di Tanah Bumbu dan menemukan manfaat nyata namun terkendala kurangnya modal dan rendahnya partisipasi. Dewi dan Dadiara (2022) menganalisis pemberdayaan nelayan melalui program SKPT di Maluku Barat Daya dan menyimpulkan bahwa keberadaan kelompok nelayan penting namun belum optimal akibat rendahnya kesadaran anggota. Sanjaya dan Handayani (2025) menemukan bahwa pemberdayaan di Desa Teluk, Pandeglang belum berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas dan akses permodalan. Mayoritas kajian tersebut berfokus pada aspek Enabling dan Empowering, sementara dimensi Maintaining yang menentukan keberlanjutan jangka panjang masih kurang mendapat perhatian dalam literatur.

Celah penelitian (*research gap*) tersebut menjadi landasan novelty penelitian

ini: menganalisis secara komprehensif seluruh dimensi teori 5P Edi Suharto (1997) dalam satu konteks penelitian, dengan penekanan khusus pada aspek Maintaining sebagai dimensi yang paling kritis namun paling jarang dianalisis. Lokus penelitian di Desa Karangsong yang memiliki karakteristik unik sebagai sentra perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan nelayan yang tinggi memberikan kebaruan kontekstual yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong berdasarkan teori 5P Edi Suharto, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pemberdayaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menganalisis secara mendalam fenomena pemberdayaan masyarakat nelayan kecil sebagaimana adanya di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penelitian bersifat kontekstual, kompleks, dan memerlukan pemahaman tentang perspektif para pelaku (Creswell, 2014).

Lokasi penelitian adalah Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu,

Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada posisi strategis desa tersebut sebagai sentra perikanan tangkap dengan konsentrasi nelayan kecil yang besar, serta adanya berbagai permasalahan pemberdayaan yang belum terpecahkan.

Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, mencakup delapan informan kunci yang mewakili tiga level: (1) level pemerintah daerah, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu; (2) level kelembagaan menengah, meliputi Kepala Seksi Pemberdayaan Kecamatan Indramayu, Lurah Desa Karangsong, serta Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura (GNP) dan Staf Koperasi KPL Mina Sumitra; dan (3) level masyarakat nelayan, yaitu empat nelayan kecil di bawah 5 GT Desa Karangsong.

Pengumpulan data dilaksanakan pada November–Desember 2025 melalui tiga teknik: wawancara semi-terstruktur secara mendalam dengan panduan pertanyaan yang mencakup seluruh dimensi teori 5P, observasi langsung terhadap aktivitas nelayan dan fasilitas pendukung, serta dokumentasi berupa arsip pemerintah daerah, profil desa, dan laporan program pemberdayaan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña

(2014) yang terdiri dari tiga tahap: (1) kondensasi data, meliputi pemilihan, pemfokusan, dan transformasi data dari transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang terstruktur berdasarkan indikator teori; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Proses Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu di analisis berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat 5P menurut Edi Suharto , yakni Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

a. Pemungkinan

Aspek pemungkinan menekankan penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat nelayan memiliki kesempatan, akses, dan kemampuan

untuk berkembang melalui pengurangan hambatan struktural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu telah menjalankan program unggulan berupa Informasi Daerah Penangkapan Ikan (IDPI), pemberian bantuan alat tangkap sesuai proposal kebutuhan nelayan, serta pembuatan sertifikat nelayan secara gratis sebagai persyaratan akses kredit perbankan. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil:

“Untuk nelayan kecil ini kami ada program unggulan yaitu IDPI, program ini bertujuan memberikan informasi langsung kepada para nelayan daerah penangkapan ikan, selain itu juga kami menghibahkan alat-alat tangkap yang sesuai dengan proposal yang dibutuhkan nelayan”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyediakan bantuan langsung, tetapi juga membuka akses terhadap sumber permodalan formal. Di tingkat kelembagaan, Koperasi KPL Mina Sumitra berperan sebagai mediator antara pemerintah dan nelayan dalam penyaluran informasi dan koordinasi program, namun temuan lapangan mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara ketersediaan program dan jangkauannya di tingkat nelayan. Beberapa informan nelayan menyatakan belum pernah menerima bantuan secara langsung, meskipun mengetahui adanya program tersebut. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi kompleksitas prosedur pengajuan proposal, rendahnya literasi administratif nelayan,

ketergantungan pada tengkulak yang membatasi akses modal, serta fluktuasi cuaca yang mengganggu konsistensi kehadiran dalam program. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi pemungkinan telah diciptakan

Temuan ini sejalan dengan perspektif Suharto (1997) yang menegaskan bahwa pemungkinan bukan sekadar menyediakan program, melainkan juga memastikan seluruh hambatan yang menghalangi masyarakat dapat diatasi. Hal ini dikuatkan oleh Alghiffari dan Slipilia (2026) yang menemukan bahwa distribusi bantuan alat tangkap di Kota Pariaman mampu meningkatkan kapasitas produksi nelayan, namun efektivitasnya terbatas karena partisipasi nelayan dalam perencanaan yang masih rendah.

b. Penguatan

Aspek penguatan berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat nelayan agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan transfer pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah program pelatihan telah dilaksanakan, antara lain pelatihan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil untuk meningkatkan kompetensi berlayar, pelatihan keselamatan kerja di laut, serta program pemberdayaan istri

nelayan melalui pelatihan pengolahan bandeng tanpa duri (Program BIDURI). Pemerintah kecamatan berperan dalam pembinaan agar program-program tersebut tersalurkan secara tepat sasaran.

Temuan menonjol dalam aspek ini adalah tingginya daya serap nelayan terhadap teknologi dan pengetahuan baru. Hal ini dikonfirmasi secara konsisten oleh seluruh informan dari berbagai level, mulai dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Kecamatan, Koperasi, hingga nelayan itu sendiri. Ketua Umum GNP menyatakan bahwa nelayan sangat mudah memahami teknologi ketika ditransferkan kepada mereka. Pemerintah desa mengkonfirmasi bahwa nelayan biasanya dapat cepat menyesuaikan diri dengan program baru. Kemampuan adaptasi yang cepat ini merupakan modal sosial yang berharga namun belum dioptimalkan karena ketidakmerataan jangkauan pelatihan. Sebagian nelayan menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan apapun, sementara yang lain mengakui telah ikut serta dalam program tertentu. Selain itu, tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah menjadi hambatan dalam mengakses regulasi dan memahami prosedur program yang semakin kompleks.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa fokus penguatan seharusnya tidak lagi terletak pada tahap pengenalan dasar, melainkan pada penguatan aspek penerapan dan perluasan jangkauan agar kemampuan adaptasi yang

sudah dimiliki nelayan dapat dimaksimalkan. Hasil ini selaras dengan temuan Sagala et al. (2017) yang menemukan bahwa nelayan pada dasarnya mampu memanfaatkan berbagai teknologi penangkapan sebagai bentuk adaptasi, namun memerlukan fasilitasi yang terstruktur untuk mengoptimalkannya.

c. Perlindungan

Aspek perlindungan mencakup upaya melindungi masyarakat nelayan dari kemungkinan eksploitasi dan ketidakadilan, baik dari sisi jaminan sosial maupun perlindungan hukum. Di antara kelima aspek 5P, Perlindungan merupakan dimensi yang berjalan paling baik dalam konteks penelitian ini. Program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil telah memberikan jaminan sosial berupa perlindungan keselamatan kerja di laut, termasuk santunan kecelakaan dan asuransi jiwa. Bukti visual distribusi kartu BPJS kepada nelayan diperoleh dari dokumentasi lapangan.

Koperasi KPL Mina Sumitra memainkan peran protektif yang signifikan melalui penyediaan advokasi hukum ketika nelayan menghadapi permasalahan, baik dengan oknum maupun dengan regulasi pemerintah.

Koperasi juga menyediakan fasilitas pelelangan ikan dengan mekanisme pasar bebas sebagai alternatif dari ketergantungan nelayan pada tengkulak yang selama ini menentukan harga secara sepihak. Di tingkat desa, pemerintah desa turut berperan dalam menjaga keamanan kapal-kapal yang menepi, termasuk dengan melakukan patroli siang dan malam.

Meskipun demikian, perlindungan dalam aspek stabilitas harga ikan masih menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa informan nelayan menyatakan bahwa perlindungan yang paling dibutuhkan adalah jaminan harga ikan yang stabil, karena fluktuasi harga secara langsung menentukan kemampuan mereka untuk melanjutkan aktivitas melaut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan ekonomi jangka panjang perlu diperkuat, tidak hanya pada aspek keselamatan kerja tetapi juga pada stabilitas pendapatan nelayan.

d. Penyokongan

Aspek penyokongan mengacu pada pemberian dukungan agar kelompok rentan mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara mandiri. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyokongan telah diwujudkan melalui tiga jalur utama: (1) bantuan sarana produksi berupa alat tangkap dan perahu; (2) akses permodalan melalui koperasi dalam bentuk

pinjaman kepada anggota; dan (3) jaminan sosial kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Umum GNP melaporkan bahwa dari tahun ke tahun, nelayan banyak yang merasa terbantu melalui mekanisme koperasi, meskipun persyaratan keanggotaan dinilai masih menyulitkan sebagian nelayan.

temuan lapangan mengungkapkan kesenjangan persepsi yang tajam antara pihak pemberi program dan penerima manfaat. Pemerintah daerah menilai keberhasilan penyokongan dari aspek prosedural dan selektivitas bantuan, sementara nelayan mengukurnya berdasarkan manfaat nyata dan pemerataan yang dirasakan. Kepala Bidang Pemberdayaan menegaskan bahwa seleksi dilakukan seketat mungkin agar bantuan tidak diperjualbelikan, namun dari sisi nelayan justru muncul persepsi bahwa bantuan masih menyasar kelompok tertentu saja dan belum merata. Seorang nelayan menyatakan:

"Saya rasa bantuan ini dari yang saya ketahui dari teman-teman nelayan masih belum merata, dan kadang yang dapat juga orang yang memang mampu secara ekonomi."

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyokongan tidak hanya bergantung pada mekanisme penyaluran yang tertib, melainkan juga pada pemerataan dan manfaat nyata yang

dirasakan seluruh nelayan kecil. Dukungan yang paling dibutuhkan nelayan pada dasarnya berpusat pada tiga komponen yang saling terkait: stabilitas harga ikan, kemudahan akses modal, dan ketersediaan sarana produksi. Tanpa modal yang cukup, nelayan tidak dapat melaut dan pendapatan terhenti. Tanpa jaring dan alat tangkap yang memadai, hasil tangkapan tidak optimal. Temuan ini selaras dengan Pathony et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa keberadaan bantuan saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan apabila akses dan distribusinya belum merata.

e. Pemeliharaan

Aspek pemeliharaan merupakan dimensi yang paling kritis sekaligus paling lemah dalam pemberdayaan nelayan kecil di Desa Karangsong. Pemeliharaan dalam kerangka teori Suharto (1997) menekankan pentingnya menjaga stabilitas perubahan yang telah dicapai agar tidak mengalami kemunduran, melalui pendampingan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi adaptif, serta penguatan kemandirian jangka panjang

Temuan menunjukkan kontradiksi yang nyata antara rancangan program di tingkat kebijakan dan pengalaman nelayan di lapangan. Di sisi pemerintah daerah, terdapat upaya mempertahankan keberlanjutan melalui penyesuaian kegiatan pemberdayaan dengan kebutuhan pasar, pelaksanaan rapat koordinasi

bulanan antara kecamatan, kepala desa, dan UPTD, serta fasilitasi akses pasar bagi produk olahan istri nelayan. Namun, di tingkat nelayan kecil, program-program tersebut dipersepsikan sebagai kegiatan yang bersifat musiman dan tidak berkelanjutan. Dua informan nelayan menyuarakan hal yang sama:

"Kalau ada program dari pemerintah itu biasanya diberikan, abis itu tidak ada keberlanjutan."

Pemerintah desa secara tegas mengakui tidak adanya pendampingan berkelanjutan secara khusus di tingkat desa. Program BIDURI yang mencakup fasilitasi akses pasar menjadi contoh praktik pemeliharaan yang lebih baik, namun jangkauannya masih terbatas. Analisis menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan memerlukan sinergi tiga unsur yang saling melengkapi: konsistensi pendampingan dari pemerintah dan lembaga terkait, sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan adaptif, serta kemauan dan inisiatif masyarakat nelayan untuk mengembangkan hasil yang telah diperoleh. Tanpa keterkaitan ketiga unsur ini, program berisiko tidak berlanjut secara optimal.

Kondisi ini mengkonfirmasi temuan Alom (2016) yang menemukan

ketimpangan antara persepsi pemerintah dan nelayan terhadap keberlanjutan program pemberdayaan, di mana program yang dirancang baik di tingkat kebijakan sering tidak dirasakan keberlanjutannya oleh penerima manfaat akibat terbatasnya dukungan pasca-bantuan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya transformasi paradigma pemberdayaan dari model programatik-transaksional yang berhenti pada distribusi bantuan menuju model pendampingan berkelanjutan yang memastikan hasil pemberdayaan terintegrasi dalam kehidupan nelayan jangka panjang.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil di
Desa Karangsong Kecamatan Indramayu
Kabupaten Indramayu**

a. Faktor Internal

Tiga faktor internal berhasil diidentifikasi. Pertama, motivasi nelayan tergolong tinggi namun bersifat kondisional, yaitu sangat dipengaruhi oleh manfaat langsung yang diperoleh dari program. Nelayan cenderung antusias berpartisipasi ketika program memberikan keuntungan nyata seperti perolehan alat tangkap atau peningkatan keterampilan, namun menjadi pasif ketika tidak ada insentif yang dirasakan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Maygasi dan Silverius (2020) bahwa partisipasi nelayan akan meningkat jika program yang diberikan mampu

memberikan manfaat nyata dan relevan.

Kedua, kemampuan adaptasi teknologi nelayan tergolong cepat dan baik. Seluruh informan, dari berbagai level, secara konsisten menyatakan bahwa nelayan mampu memahami dan menerapkan teknologi baru dengan relatif cepat ketika ditransferkan. Kemampuan ini merupakan potensi internal yang berharga namun belum dimanfaatkan secara optimal karena ketidakmerataan jangkauan program pelatihan.

Ketiga, modal sosial dalam bentuk kelompok nelayan memiliki tingkat keaktifan yang cukup baik di Desa Karangsong, dengan lebih dari 300 kelompok nelayan di Kabupaten Indramayu. Kelompok nelayan berperan sebagai wadah koordinasi dan penyebaran informasi program. Namun, keaktifan kelompok tidak selalu diikuti oleh pemerataan partisipasi anggota, di mana sebagian nelayan tidak terlibat dalam kelompok maupun dalam kegiatan yang dilaksanakan. Temuan ini selaras dengan Dewi et al. (2022) yang menemukan bahwa kelompok nelayan berperan penting namun belum optimal karena masih terdapat keterbatasan kesadaran anggota.

b. Faktor Eksternal

Tiga faktor eksternal juga diidentifikasi. Pertama, kebijakan pemerintah dan dukungan program merupakan faktor penentu utama. Kerangka regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memberikan landasan hukum bagi program pemberdayaan. Dinas Perikanan dan Kelautan memainkan peran sentral, didukung oleh CSR perusahaan seperti Pertamina, namun, implementasi kebijakan menghadapi kendala dalam pemerataan distribusi bantuan, sehingga sebagian nelayan belum menerima manfaat secara langsung.

Kedua, peran fasilitator dan pendamping, yaitu koperasi KPL Mina Sumitra dan Gerakan Nelayan Pantura, sangat signifikan dalam menjembatani antara program pemerintah dan nelayan. Koperasi tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga advokasi dan mediator informasi. Keterbatasan utama adalah bahwa tidak semua nelayan dapat menjadi anggota koperasi karena persyaratan yang dipandang masih menyulitkan.

Ketiga, kerja sama antarlembaga antara Dinas Perikanan dan Kelautan, kecamatan, pemerintah desa, dan koperasi merupakan faktor pendukung yang penting. Koordinasi rutin bulanan melalui rapat koordinasi antara

kecamatan, kepala desa, dan UPTD menjadi mekanisme pengawasan. Namun, koordinasi ini belum cukup kuat untuk memastikan pendampingan yang konsisten di tingkat nelayan, terutama dalam aspek pemeliharaan program pasca-distribusi bantuan.

Tabel 2. . Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Nelayan Kecil di Desa Karangsong

Dimensi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Faktor Internal	Motivasi nelayan tinggi; kemampuan adaptasi teknologi cepat; kelompok nelayan aktif	Motivasi bersifat kondisional (berbasis manfaat); partisipasi kelompok tidak merata; rendahnya pendidikan formal
Faktor Eksternal	Regulasi daerah yang mendukung (Perda No. 2/2019); dukungan Dinas Perikanan; peran koperasi sebagai mediator; koordinasi lintas lembaga	Distribusi bantuan tidak merata; prosedur administratif kompleks; ketergantungan pada tengkulak; koordinasi antarlembaga belum optimal

Sumber: Diolah peneliti

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu telah berlangsung melalui berbagai program yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kelima dimensi teori 5P Edi Suharto, namun dengan tingkat pencapaian yang berbeda-beda. Aspek Enabling,

Empowering, dan Supporting telah berjalan melalui program IDPI, pelatihan kapasitas nelayan, bantuan sarana produksi, dan jaminan sosial BPJS, meskipun distribusinya belum merata dan inklusif. Aspek Protecting berjalan relatif baik melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum oleh koperasi. Aspek Maintaining menjadi titik lemah yang paling kritis karena program cenderung bersifat sporadis tanpa pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah mengkonfirmasi bahwa implementasi teori 5P di lapangan tidak berjalan secara linier dan seragam. Terdapat hierarki kelemahan di antara kelima dimensi, di mana Maintaining merupakan dimensi yang paling rentan gagal dalam konteks program pemberdayaan berbasis pemerintah yang cenderung berorientasi pada output dan distribusi. Celah antara rancangan program di tingkat kebijakan dan pengalaman nyata nelayan di tingkat grassroots menunjukkan perlunya transformasi paradigma pemberdayaan dari model transaksional menuju model pendampingan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup: (1) perlunya Dinas Perikanan dan Kelautan merancang sistem pendampingan jangka panjang yang terstruktur, bukan hanya distribusi bantuan sesaat, seperti penggunaan teknologi, pengelolaan hasil tangkapan, serta

pemasaran hasil laut; (2) pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga, khususnya antara Dinas Perikanan, kecamatan, dan koperasi, untuk memastikan konsistensi program di tingkat desa, seperti pada acara Nadran tahunan diadakan program pemberdayaan nelayan; (3) perlunya menyederhanakan prosedur administratif bantuan agar nelayan kecil dengan kapasitas literasi terbatas dapat mengakses program, seperti pada program pelatihan BIDURI yang melakukan pemeliharaan berkelanjutan dan (4) diperlukannya evaluasi berkala yang melibatkan nelayan sebagai penerima manfaat untuk memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah agar dapat menghasilkan analisis komparatif yang lebih komprehensif tentang pemberdayaan nelayan kecil di kawasan Pantura Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, A., & Karomah, W. (2022). Pemberdayaan nelayan berbasis entrepreneurship. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 56–75.
<https://doi.org/10.58518/participator>

- Alghiffari, H., & Slipilia, I. (2026). The effectiveness of assistance provided by the department of agriculture, food, and fisheries in enhancing fishermen's empowerment in Pariaman City. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(1), 626–638. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.1562>
- Azizah, A., & Tahir, M. H. (2025). Evaluation of coastal community empowerment policy in Selayar Islands Regency. *Jurnal Aktor*, 6(1), 28–36.
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2024). Produksi perikanan tangkap menurut kabupaten/kota provinsi Jawa Barat, 2022. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Desa Karangsong. (2024). *Profil Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu*. Pemerintah Desa Karangsong.
- Dewi, M. F., & Dadiara, F. S. (2022). Pemberdayaan kelompok nelayan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Maluku Barat Daya. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(1), 82–100. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2417>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Statistik perikanan tangkap Indonesia 2021–2024*. KKP.
- Kusnadi. (2002). *Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan*. LKiS.
- Lambe, K. H. P., Radjab, M., & Sabiq, M. (2021). Motivasi nelayan di kalangan pemuda (Studi kasus anak muda milenial masyarakat nelayan Galesong Utara, Kabupaten Takalar). *AGRIKAN: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 14(2), 365–369.
- Maani, K. D., Fajri, H., Wahyuni, N., & Malau, H. (2021). Collaborative governance sebagai solusi dalam tata kelola pemberdayaan nelayan. *Sosio Informa*, 7(2), 73–88.
- Maygasi, & Silverius, Y. (2020). Pemberdayaan nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mutiar, R. (2018). Kemiskinan nelayan kecil di Desa Karangsong: Analisis garis kemiskinan BPS. *Jurnal Ekonomi Pesisir*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan*.
- Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia*.
- Rifai, A., et al. (2025). Pemberdayaan nelayan melalui kelompok nelayan di Desa Juntikedokan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Republika Online. (2023, Oktober 18).

- Nelayan Indramayu mengamuk di SPBN Karangsong.
- Sagala, S. A. H., Argo, T. A., Asirin, Adhitama, P., & Dodon. (2017). Strategi adaptasi nelayan terhadap dampak perubahan lingkungan (Studi kasus: Pemanfaatan teknologi penangkapan ikan laut). *Jurnal Penataan Ruang*, 9(1). <https://doi.org/10.12962/j2716-179x.v9i1.2245>
- Sangko, A. N., et al. (2024). Strategi pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan pada masyarakat pesisir di Desa Ponosakan Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 306–312.
- Sanjaya, N., & Handayani, S. A. (2025). Community empowerment strategy for traditional fishermen in Teluk Village Labuan Sub-District Pandeglang Regency. *Jurnal Administrasi*.
- Siby, G. J. A., Karauwan, H. F., & Arie. (2024). Efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).
- Suaib, M. (2023). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Penerbit Adab.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Suryani, L., Sompa, A. T., & Budhi, S. (2021). Participatory empowerment of capture fisheries collective business group (KUB) in Tungkaran Pangeran Sub-District, Tanah Bumbu Regency. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 2(01), 1–12.
- Tati, R. (2022). Profil sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Karangsong. *Penelitian Sosial Ekonomi*.
- Triyanti, R., & Firdaus, M. (2016). Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(1)

